



14
Februari
2024

Sistem Informasi Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024

SIKADEKA



GAMBARAN UMUM

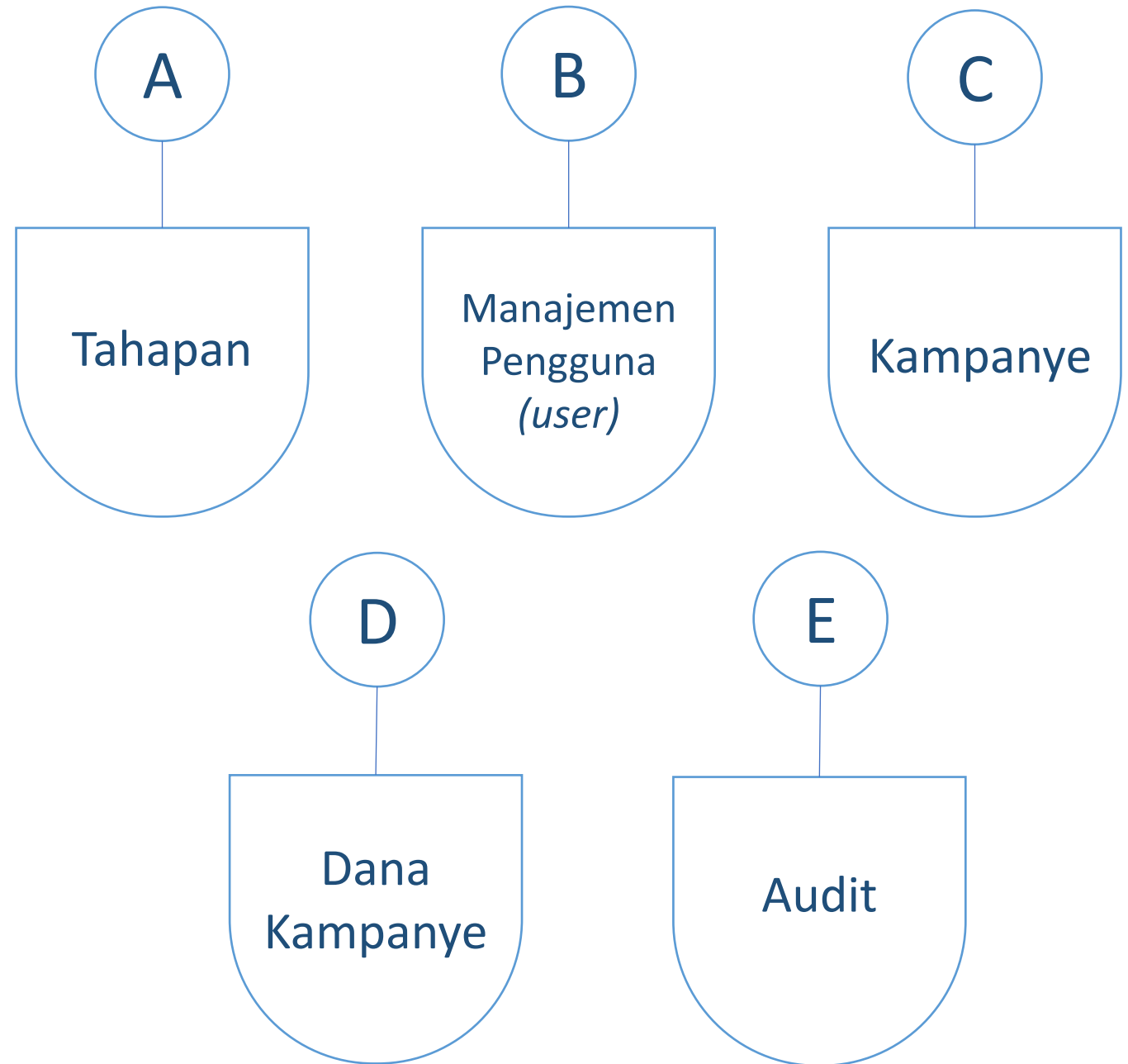
Sikadeka merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk membantu dalam mengelola kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye peserta Pemilu tahun 2024.

Secara umum fungsi sikadeka adalah:

1. Mengelola kegiatan kampanye
2. Mengelola Pelaporan dana kampanye
3. Mengelola audit dana kampanye



RUANG LINGKUP





TAHAPAN KAMPANYE

Tahapan Kampanye untuk peserta pemilu:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	KAMPANYE PEMILU		
	a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Kegiatan lain, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c. Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
2	KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA		
	a. Kampanye Pemilu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
	b. Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024



TAHAPAN DANA KAMPANYE

Tahapan Dana Kampanye untuk Partai Politik

NO	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	14 Desember 2022 (Partai Ummat: 30 Desember 2022)	27 November 2023
2	Periode LADK	17 Desember 2022 (Partai Ummat: 02 Januari 2023)	06 Januari 2024
3	Penyampaian LADK	07 Januari 2024	07 Januari 2024
4	Pelaporan LADK Perbaikan	08 Januari 2024	12 Januari 2024
5	Periode LPPDK	17 Desember 2022 (Partai Ummat: 02 Januari 2023)	22 Februari 2024
6	Penyampaian LPPDK	22 Februari 2024	28 Februari 2024
7	Audit	23 Februari 2024	29 Maret 2024
8	Penyampaian Hasil Audit	23 Maret 2024	29 Maret 2024
9	Pengumuman Hasil Audit	24 Maret 2024	08 April 2024



TAHAPAN DANA KAMPANYE

Tahapan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon

NO	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	13 November 2023	26 November 2023
2	Periode LADK	16 November 2023	26 November 2023
3	Penyampaian LADK	16 November 2023	27 November 2023
4	Pelaporan LADK Perbaikan	17 November 2023	02 Desember 2023
5	Periode LPPDK	16 November 2023	22 Februari 2024
6	Penyampaian LPPDK	23 Februari 2024	29 Februari 2024
7	Audit	23 Februari 2024	29 Maret 2024
8	Penyampaian Hasil Audit	24 Maret 2024	05 April 2024
9	Pengumuman Hasil Audit	24 Maret 2024	08 April 2024



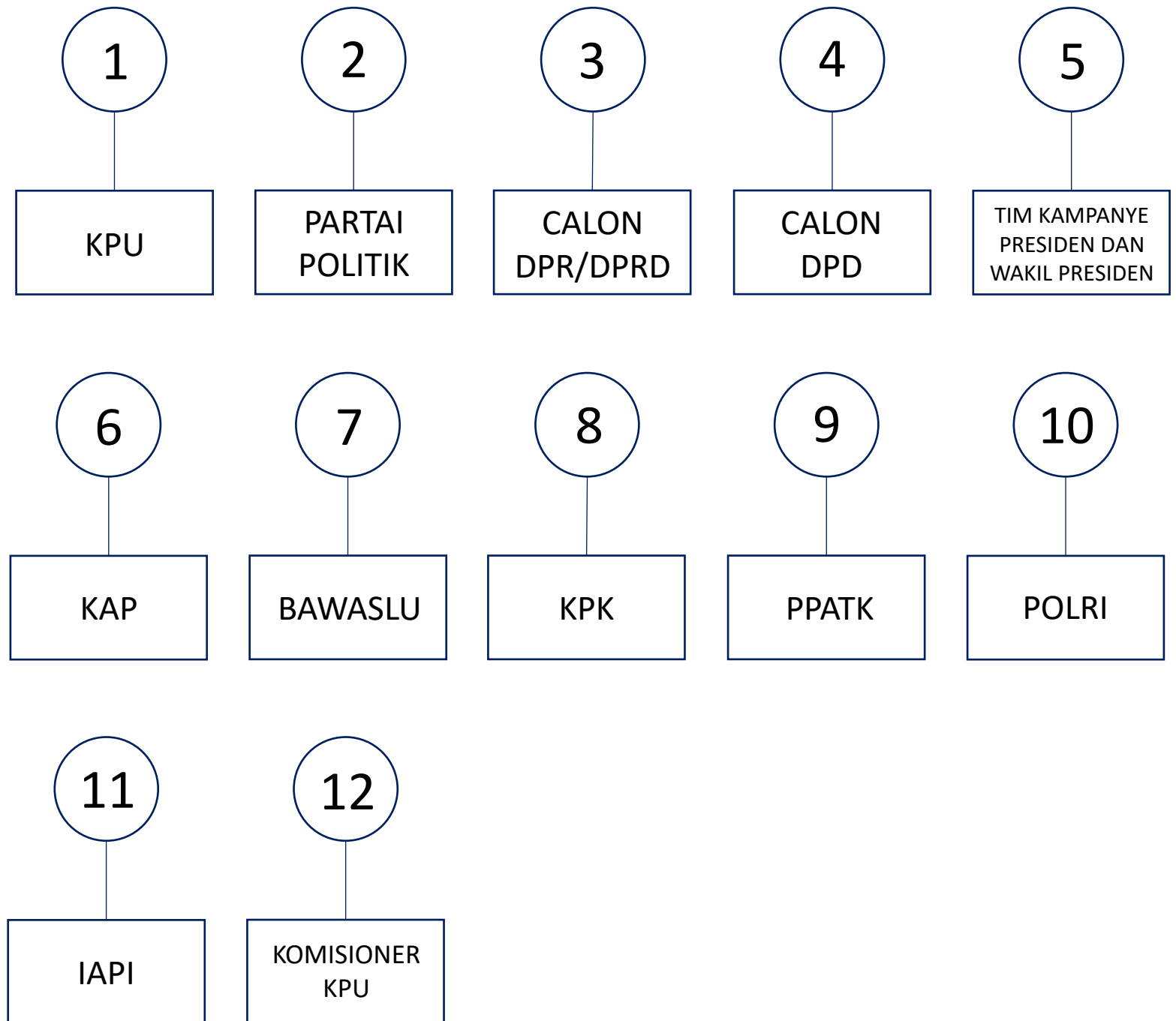
TAHAPAN DANA KAMPANYE

Tahapan Dana Kampanye untuk DPD

NO	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	03 November 2023	27 November 2023
2	Periode LADK	06 November 2023	06 Januari 2024
3	Penyampaian LADK	07 Januari 2024	07 Januari 2024
4	Pelaporan LADK Perbaikan	08 Januari 2024	12 Januari 2024
5	Periode LPPDK	06 November 2023	22 Februari 2024
6	Penyampaian LPPDK	23 Februari 2024	29 Februari 2024
7	Audit	23 Februari 2024	29 Maret 2024
8	Penyampaian Hasil Audit	24 Maret 2024	05 April 2024
9	Pengumuman Hasil Audit	24 Maret 2024	08 April 2024



MANAJEMEN PENGGUNA





Akun yang dapat mendaftar secara mandiri

1. Admin KPU Tingkat Pusat
2. Admin KPU Tingkat Provinsi
3. Admin KPU Tingkat Kab/Kota
4. Admin Partai Politik Tingkat Pusat
5. Admin Tim Kampanye Nasional
6. Admin DPD
7. Bawaslu Tingkat Pusat



Admin KPU

- a) Pendaftaran Admin KPU Tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota mendaftar secara mandiri
- b) Jumlah Admin KPU sebanyak satu user untuk masing – masing satker
- c) Admin KPU dapat mendaftarkan:
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan Operator KPU Pusat (lebih dari satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan Komisioner KPU Pusat (lebih dari satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan KAP Parpol Pusat (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan KAP Parpol Provinsi (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan KAP Parpol Kab/Kota (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan KAP DPD (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan KAP Presiden (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan KPK (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan PPATK (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan POLRI (satu user)
 - Admin KPU Pusat mendaftarkan IAPI (satu user)

 - Admin KPU Provinsi mendaftarkan Operator KPU Provinsi (lebih dari satu user)
 - Admin KPU Provinsi mendaftarkan Komisioner KPU Provinsi (lebih dari satu user)

 - Admin KPU Kab/Kota mendaftarkan Operator KPU Kab/Kota (lebih dari satu user)
 - Admin KPU Kab/Kota mendaftarkan Komisioner KPU Kab/Kota (lebih dari satu user)

Admin Partai Politik Tingkat Pusat



- a) Pendaftaran Admin Partai Politik Tingkat Pusat mendaftarkan secara mandiri
- b) Jumlah Admin Partai Politik Tingkat Pusat di isi sebanyak satu user untuk masing – masing partai politik
- c) Admin Partai Politik Tingkat Pusat mendaftarkan:
 - Operator Partai Politik Tingkat Pusat
 - Operator Calon DPR RI
 - Admin Partai Politik Tingkat Provinsi
 - Admin Partai Politik Tingkat Kab/Kota
- d) Operator partai politik di tingkat pusat dapat dibuat lebih dari satu user
- e) Operator Calon DPR RI di buat satu user untuk masing – masing calon DPR RI
- f) Admin Partai Politik dan Operator Partai Politik di tingkat pusat, dapat mengakses dan mengerjakan seluruh wilayah kerja baik provinsi maupun kab/kota sesuai dengan ketentuan hak akses admin dan operator
- g) Admin Partai Politik Tingkat Pusat dalam hal mendaftarkan Admin Partai Politik Tingkat Provinsi dengan ketentuan:
 - Satu user di partai politik yang sama dapat memiliki wilayah kerja lebih dari satu wilayah provinsi. Misal: User atas nama Tony Stark memiliki wilayah kerja Admin di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Banten
 - Maksimal wilayah kerja untuk satu user di parpol yang sama adalah sejumlah provinsi yaitu 38 Provinsi
- h) Admin Partai Politik Tingkat Pusat dalam hal mendaftarkan Admin Partai Politik Tingkat Kab/Kota dengan ketentuan:
 - Satu user di partai politik yang sama dapat memiliki wilayah kerja lebih dari satu wilayah Kab/Kota. Misal: User atas nama Jet Lee memiliki wilayah kerja Admin di Tangerang, Depok dan Bandung
 - Maksimal wilayah kerja untuk satu user di parpol yang sama adalah sejumlah Kab/Kota yaitu 514 Kab/Kota

Admin Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kab/Kota



- a) Admin Partai Politik di tingkat Provinsi, mendaftarkan Operator Partai Politik di tingkat provinsi sesuai dengan wilayah kerja yang dimiliki Admin Partai Politik Tingkat Provinsi. Misal: jika Admin tersebut didaftarkan/memiliki wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara dan Banten, maka admin tersebut dapat mendaftarkan operator partai politik untuk provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara dan Banten
- b) Admin Partai Politik di tingkat Provinsi, mendaftarkan Operator Calon DPRD Provinsi sebanyak satu user untuk satu Calon DPRD Provinsi
- c) Admin Partai Politik di tingkat Kab/Kota, mendaftarkan Operator Partai Politik di tingkat Kab/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang dimiliki Admin Partai Politik Tingkat Kab/Kota. Misal: jika Admin tersebut didaftarkan/memiliki wilayah kerja di Kab/Kota Tangerang, Depok dan Bandung, maka admin tersebut dapat mendaftarkan operator partai politik untuk Kab/Kota Tangerang, Depok dan Bandung
- d) Admin Partai Politik di tingkat Kab/Kota, mendaftarkan Operator Calon DPRD Kab/Kota sebanyak satu user untuk satu Calon DPRD Kab/Kota
- e) Admin Partai Politik dan Operator Partai Politik setelah login, ditampilkan ke halaman wilayah kerja terlebih dahulu. Supaya user dapat memilih untuk mengerjakan transaksi data di wilayah kerja yang dimaksud
- f) Halaman wilayah kerja dapat diakses kembali untuk admin partai politik atau operator partai politik yang memiliki satu wilayah kerja atau memiliki lebih dari satu wilayah kerja

Admin Tim Kampanye



- a) Pendaftaran Admin Tim Kampanye Nasional, mendaftarkan secara mandiri
- b) Jumlah Admin Tim Kampanye Nasional di isi sebanyak satu user untuk masing – masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- c) Admin Tim Kampanye Nasional mendaftarkan:
 - Operator Tim Kampanye Nasional
 - Operator Tim Kampanye Provinsi
 - Operator Tim Kampanye Kab/Kota
- d) Jumlah Operator Tim Kampanye Nasional sebanyak satu user
- e) Admin Tim Kampanye Nasional dan Operator Tim Kampanye Nasional, dapat mengakses dan mengerjakan seluruh wilayah kerja baik provinsi maupun kab/kota sesuai dengan ketentuan hak akses admin dan operator
- f) Admin Tim Kampanye Nasional dalam hal mendaftarkan Operator Tim Kampanye Provinsi, dengan ketentuan:
 - Satu user Tim Kampanye Provinsi untuk pasangan calon yang sama, dapat memiliki wilayah kerja lebih dari satu wilayah provinsi
 - Maksimal wilayah kerja untuk satu user di pasangan calon yang sama adalah sejumlah provinsi yaitu 38 Provinsi
- g) Admin Tim Kampanye Nasional dalam hal mendaftarkan Operator Tim Kampanye Kab/Kota, dengan ketentuan:
 - Satu user Tim Kampanye kab/kota di pasangan calon yang sama dapat memiliki wilayah kerja lebih dari satu wilayah Kab/Kota
 - Maksimal wilayah kerja untuk satu user di pasangan calon yang sama adalah sejumlah Kab/Kota yaitu 514 Kab/Kota
- h) Admin Tim Kampanye dan Operator Tim Kampanye (nasional, provinsi, kab/kota) setelah login, ditampilkan ke halaman wilayah kerja terlebih dahulu. Supaya user dapat memilih untuk mengerjakan transaksi data di wilayah kerja yang dimaksud
- i) Halaman wilayah kerja dapat diakses kembali untuk user yang memiliki satu wilayah kerja atau memiliki lebih dari satu wilayah kerja



Admin DPD

- a) Pendaftaran Admin DPD, mendaftar secara mandiri
- b) Jumlah Admin DPD di isi sebanyak satu user untuk masing – masing DPD
- c) Admin DPD dapat mendaftarkan satu Operator DPD

BAWASLU

- a) Pendaftaran Bawaslu Pusat, mendaftar secara mandiri
- b) Jumlah Bawaslu Pusat sebanyak satu user
- c) Bawaslu Pusat dapat mendaftarkan:
 - Bawaslu Provinsi (1 provinsi 1 user)
 - Bawaslu Kab/Kota (1 kab/kota 1 user)

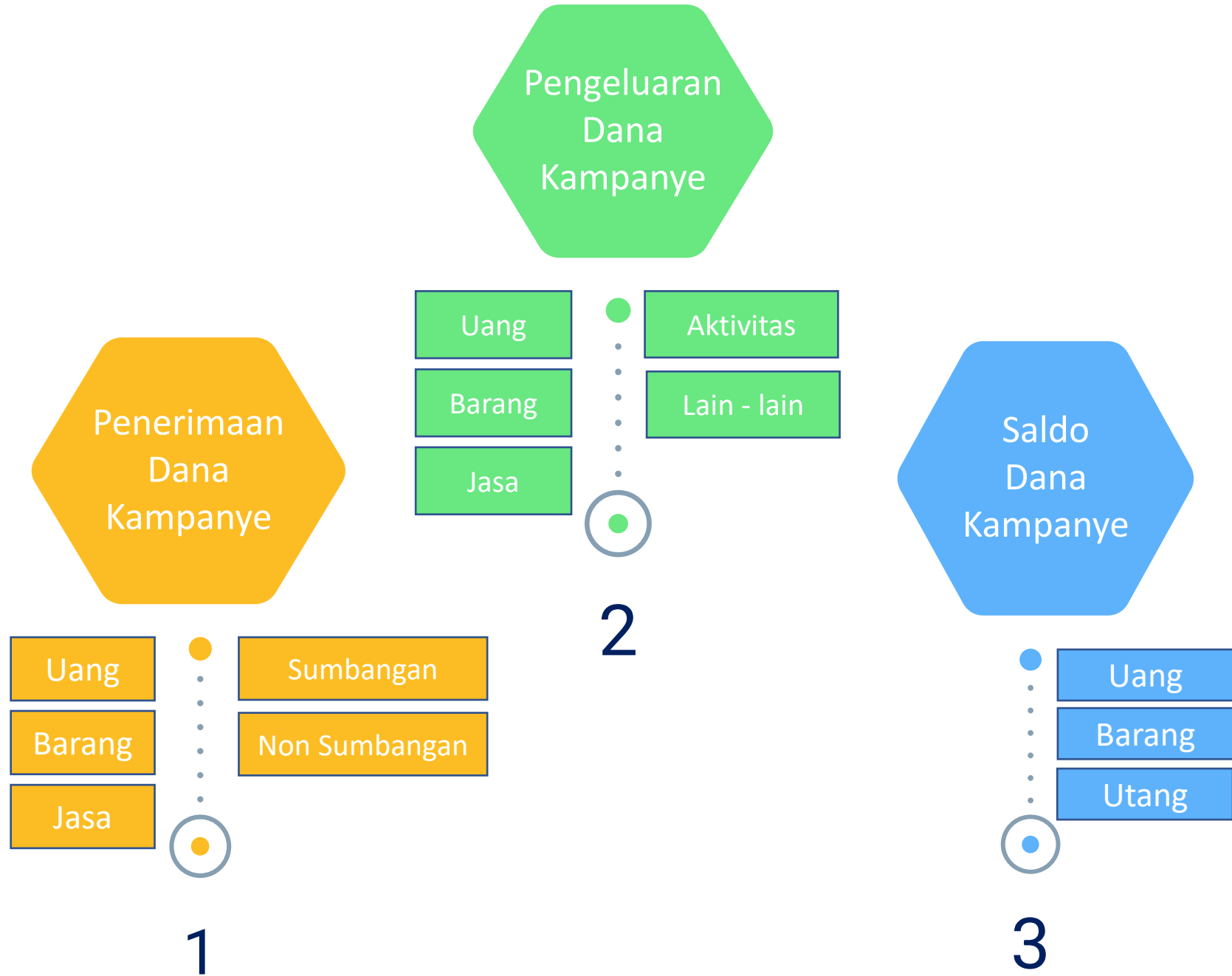


POIN – POIN KAMPANYE



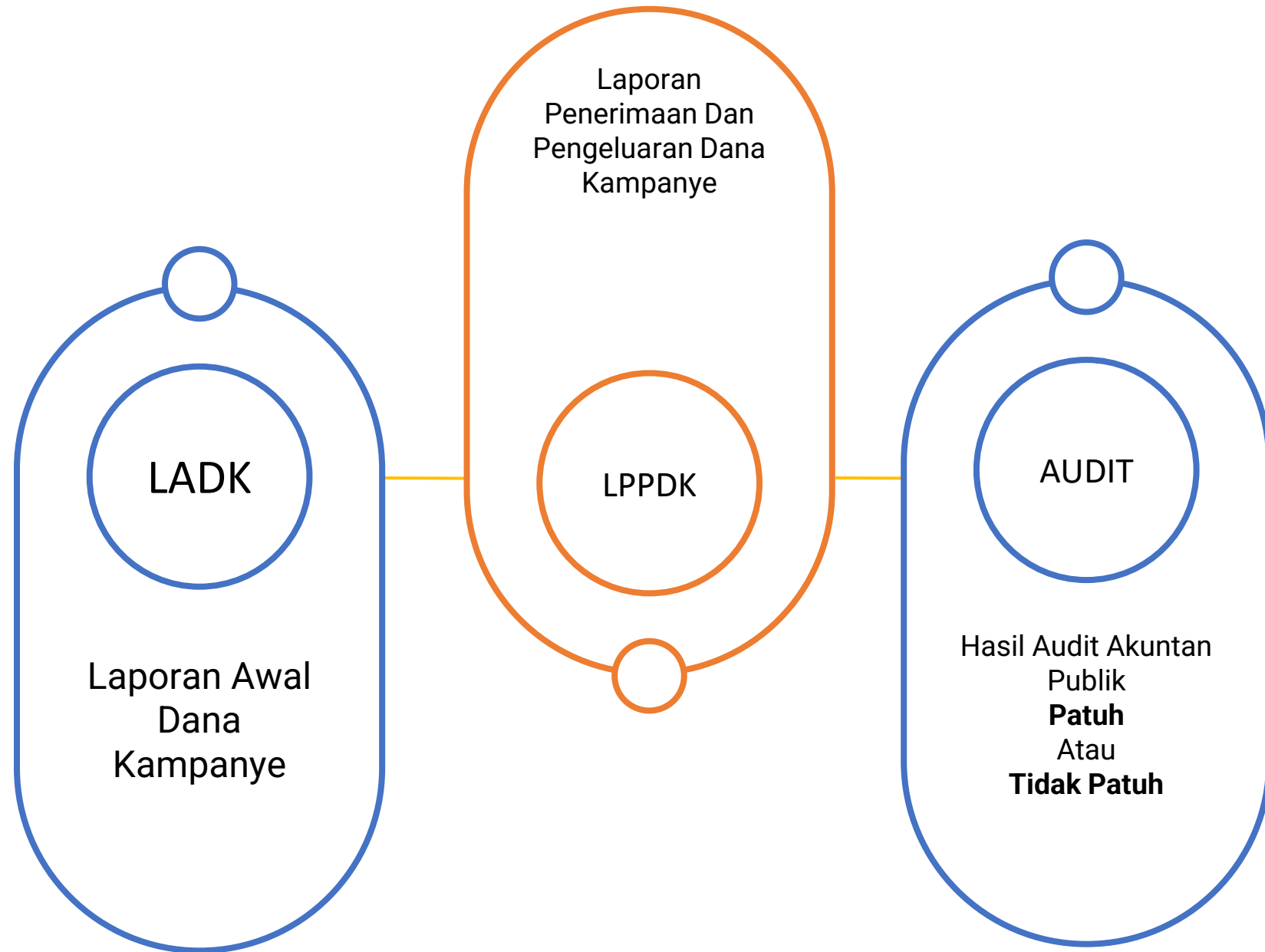


POIN – POIN DANA KAMPANYE





AUDIT





LINK BIMTEK

sikadekadev.kpu.go.id



14
Februari
2024

TERIMA KASIH



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU_Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU_RepublikIndonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU_RI)



[kpu_ri](https://www.tiktok.com/kpu_ri)